

**EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR
DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

ST. Indah Trisnawanti

NPP. 29.0702

*Asdaf Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: indahst19@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Landslides often occur and are always the highest loss impact compared to the impact of other natural disasters in Sukabumi City. The condition of the Sukabumi City area which often experiences landslides and will likely occur in the future, the Regional Disaster Management Agency continues to strive to carry out disaster risk management in the form of disaster mitigation. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Sukabumi City Regional Disaster Management Agency in mitigating landslide disasters and to find out the obstacles and efforts made by the Sukabumi City Regional Disaster Management Agency. **Method:** This research uses qualitative descriptive research method with inductive approach, which is a metode to describe things systematically about the reality and the actual circumstances in the field, to be analyzed for solving the problem that have been found. Interviews, observations and documentation as data collection techniques used by the authors. **Result:** The results of this study indicate that the effectiveness of the Regional Disaster Management Agency is classified as not effective, because it is seen from three effectiveness measures where only one indicator can be said to be achieved, namely integration, while the achievement of goals and adaptation is still not optimal.. **Conclusion:** Classified as not effective ,because of the obstacles in the two indicators, among others, inadequate and quality infrastructure and staff. Efforts made in overcoming these obstacles are cooperation between government agencies or vertical agencies, increasing the capacity of employees by routinely carrying out training and socialization, and inviting all regional heads and communities whose areas are prone to landslides.*

Keywords: *Effectiveness, Disaster Management, Landslide*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Bencana tanah longsor sering terjadi dan selalu menjadi dampak kerugian tertinggi dibanding dengan dampak bencana alam lain di Kota Sukabumi. Kondisi wilayah Kota Sukabumi yang sering mengalami bencana tanah longsor dan akan kemungkinan terjadi*

di kemudian hari, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya melakukan pengelolaan risiko bencana dalam bentuk mitigasi bencana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dalam mitigasi bencana tanah longsor serta mengetahui faktor hambatan dan upaya yang dilakukan. **Metode:** Metode yang digunakan penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi pasif, wawancara semiterstruktur dan dokumen untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Efektivitas dapat diukur dengan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam steers yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah digolongkan belum efektif, karena dilihat dari tiga ukuran efektivitas dimana hanya satu indikator yang dapat dikatakan tercapai yaitu integrasi, sedangkan pencapaian tujuan dan adaptasi masih belum maksimal. **Kesimpulan:** Digolongkan belum efektif, karena adanya faktor hambatan di dua indikator tersebut antara lain faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor hambatan tersebut adalah meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah ataupun instansi vertikal, meningkatkan kapasitas pegawai dengan serta mengajak berperan aktif kepada seluruh kepala wilayah dan masyarakat yang daerahnya rawan terkena longsor.

Kata kunci: Efektivitas, Penanggulangan Bencana, Tanah Longsor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah longsor terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk salah satu kota terkecil di Jawa Barat yaitu Kota Sukabumi yang rawan bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi, dampak dari bencana hidrometeorologi bisa menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Sehingga Kota Sukabumi cukup sering mengalami bencana alam, seperti tanah longsor dan luas titikbencana longsor semakin meluas. Keadaan umum wilayah Kota Sukabumi terletak di lereng selatan kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang merupakan salah satu kota di Jawa Barat bagian selatan tengah, dengan luas wilayah 48,33 km² dan jumlah penduduk sebanyak 353.455 jiwa serta berada di ketinggian 584 mdpl.

Berdasarkan Informasi Grafis Visual Bencana Kota Sukabumi 2019, ada 248 jumlah kejadian bencana alam dengan jumlah kerugian terbesar berasal dari bencana tanah longsor sesuai dengan jumlah kejadiannya yang cukup sering terjadi yaitu 79 kali dengan jumlah kerugian Rp3.600.000.000 serta mencapai 22,37% dari luas total seluruh area terdampak dan ini menjadikan area terdampak bencana yang terluas. Tahun 2021 Kota Sukabumi telah mengalami 112 kejadian bencana pada periode Januari hingga Juli 2021. Bulan Juni merupakan bulan dengan frekuensi tertinggi bencana yang dilaporkan oleh masyarakat. Rincian bencana hingga 31 Juli 2021 ialah cuaca ekstrem 46 kejadian, 26 kejadian tanah longsor, banjir 19 kejadian, 18 kejadian kebakaran, gempa 2 kejadian, dan 1 kali kejadian puting beliung. Akibat bencana tersebut, sekitar 48 KK, 28 unit bangunan rusak dan 51,87 ha luas area terdampak. Dari keseluruhan bencana yang terjadi di awal tahun 2021 nilai

kerugian telah mencapai Rp 4.266.912.500 (Somantri, 2021).

Data-data di atas menyatakan bahwa bencana alam banyak sekali menimbulkan kerugian dan penderitaan, terkhusus bencana tanah longsor yang sering terjadi dan selalu menjadi dampak kerugian tertinggi dibanding dampak kerugian bencana lain di Kota Sukabumi. Oleh sebab itu muncul penanganan bencana yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan, strategi dan pembangunan daerah dalam penanggulangan bencana. Pemerintah membentuk lembaga penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Daerah (BNPD) yang mengkoordinasi ditingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengkoordinasi di tingkat daerah. Salah satu poin visi Kota Sukabumi yaitu terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera. Dalam pencapaian poin yang sejahtera, salah satunya melalui penyelenggaraan pemerintah, masyarakat yang sejahtera berarti digambarkan dengan kondisi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi terpenuhi dalam berbagai aspek kehidupan yang memberikan rasa kebahagiaan, baik itu secara lahir ataupun batin, salah satu kebahagiaan batin adalah dengan perasaan aman dari ancaman bencana alam.

Kondisi wilayah Kota Sukabumi yang sering mengalami bencana tanah longsor dan akan kemungkinan terjadi dikemudian hari, maka BPBD Kota Sukabumi terus berupaya melakukan pengelolaan risiko bencana dalam bentuk mitigasi bencana tanah longsor baik berupa struktural, ialah dengan adanya pembangunan infrastruktur untuk mengurangi dampak risiko bencana tersebut seperti pemasangan *early warning system* (EWS) dan penyusunan *database* bencana serta upaya mitigasi non-struktural seperti pelatihan, pendidikan, sosialisasi, dan meningkatkan kapasitas masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan hasil informasi awal yang diperoleh dari Narasi Akhir SPM Kota BPBD 2020 terdapat beberapa fenomena permasalahan yang berhubungan dengan mitigasi di BPBD Kota Sukabumi, sebagai berikut:

- 1) Upaya pencegahan dan mitigasi secara struktural ataupun non-struktural dengan lembaga lain masih belum parsial dan sektoral, sehingga dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan perspektif kebencanaan tidak sinergis;
- 2) Masih terbatasnya SDM/Pegawai di BPBD Kota Sukabumi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan, hal ini dikhawatirkan tidak dapat menangani dengan baik masalah kebencanaan karena kapasitas personal yang terbatas dan perangkat kerja yang masih kurang;
- 3) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PPB) belum optimal diimplementasikan hal ini karena belum terbitnya Peraturan Walikota turunan dari Perda Kebencanaan operasional pelaksanaan lapangan;
- 4) Adanya kebijakan *refocusing* anggaran disertai *refocusing* terhadap target kinerja mengakibatkan sejumlah kegiatan tidak bisa dilakukan;
- 5) Masih belum memadai alokasi anggaran penanggulangan bencana yang disediakan oleh pemerintah daerah

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, antara lain penelitian Mimi Salminah dan Alviya yang berjudul Efektivitas kebijakan pengelolaan mangrove untuk mendukung mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur (Mimi Salminah and Alviya, 2019) yang memiliki hasil penelitian Ketidakefektifan dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada pengelolaan mangrove. Diperlukan koordinasi antar sektor terkait, sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dalam pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan khususnya untuk tambak.

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh kejelasan isi kebijakan, baik yang bersifat konsep maupun praktis, serta proses koordinasi dan komunikasi antar pihak, baik yang berwenang maupun yang terkena dampak kebijakan. Penelitian Putri dan Khaerani yang berjudul Strategi mitigasi tanah longsor di Kabupaten Purworejo (Putri and Khaerani 2017), yang menemukan hasil penelitian Mitigasi bencana lahan oleh BPBD Purworejo belum maksimal, karena belum ada dokumen rencana kontijensi longsor sebagai acuan tindakan, pengetahuan dan sikap masyarakat yang apatisterhadap upaya mitigasi longsor. Strategi yang telah diuji disarankan agar program yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan oleh BPBD Purwerojo.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus di mitigasi bencana tanah longsor dan berlokus di Kota Sukabumi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari suatu badan yang mempunyai tanggung jawab di bidang bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam mengukur tingkat efektivitas peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Duncan yang terdiri dari 3 faktor yaitu : pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi, hal ini berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti Putri and Khaerani. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh Mimi Salminah and Alviya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dalam mitigasi bencana tanah longsor serta mengetahui faktor hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dalam mengatasi faktor hambatan yang ada.

II. METODE

Peneliti menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian yang dilakukan dengan metode ini dapat mendeskripsikan data dan fakta lapangan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat, sedangkan instrumen kuncinya adalah peneliti. Teknik mengumpulkan data peneliti melalui observasi partisipasi pasif, wawancara semiterstruktur dan dokumen. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Pelaksanaan BPBD, Kasi pencegahan dan kesiapsiagaan, petugas lapangan masing-masing 3 orang, dan masyarakat sebanyak 4 orang yang terdiri dari Lurah, Ketua RT, mahasiswa dan warga. Analisis

data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Efektivitas diukur dengan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam steers yaitu pencapaian tujuan, integarsi dan adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kota Sukabumi yang berpedoman pada dimensi dari teori Efektivitas Duncan dalam (Streers 1985:53) dan diukur dengan indikator dimensi tersebut. Dimensi dari teori efektivitas yang peneliti gunakan antara lain pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang dinilai dengan suatu proses. Sehingga, dengan mencapai tujuan akhir yang ditetapkan terjamin, maka dibutuhkan suatu proses baik itu terhadap proses dalam mencapai bagian – bagian maupun proses dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari: Sasaran target kongkrit.

Berdasarkan telaahan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2018 – 2023, dari empat misi yang akan dijalankan, pada misi ke-2 yaitu “Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”. Mengandung tujuan “Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan” Adapun indikator tujuan dari Misi ke-2 yang akan dicapai yaitu indeks ketidaknyamanan. Sasaran dalam mencapai tujuan pada Misi ke-2 yaitu :

1. Terwujudnya Infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.
3. Meningkatkan ketangguhan Daerah terhadap bencana.

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya ketangguhan Daerah terhadap bencana yang merupakan salah satu tugas pokok pada BPBD dalam rangka mewujudkan Visi Misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator sasaran meningkatnya ketangguhan Daerah terhadap bencana adalah Indeks Kapasitas Bencana Daerah. Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

| Visi : Terwujudnya Kota Sukabumi Yang Religius, Nyaman Dan Sejahtera | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--|
| Misi II : Mewujudkan Pembangunan Tata Ruang Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan masyarakat tangguh bencana | Meningkatnya Kelas Kapasitas Daerah | Mengurangi risiko bencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana 2. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana 3. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 4. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana 5. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana |

Berdasarkan dari tabel diatas pada poin 4 arah kebijakan mengenai peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi berhubungan dengan program mitigasi bencana tanah longsor yang sudah dan sedang dilakukan oleh BPBD, hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan beliau mengatakan “berbicara tentang bencana akan menyangkut semua pihak, yang terpenting dari bencana adalah cara pengelolaan risiko bencana agar bencana tersebut tidak berdampak tinggi, maka berfokus pada pencegahan, inilah yang disebut pencegahan dini dan mitigasi bencana. Sampai saat ini kami berusaha untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi di berbagai sektor, walaupun masih banyak kekurangan secara internal maupun eksternal. Mitigasi bencana tanah longsor yang sudah kami lakukan berupa non struktural seperti sosialisasi dan lainnya, sedangkan mitigasi struktural belum ada”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan yang memuat proses berjalannya BPBD untuk mencapai tujuan mitigasi bencana tanah longsor dalam mengurangi dampak risiko bencana masih belum maksimal atau belum efektif karena belum sesuai dengan sasaran yang ditentukan dan belum tercapainya SPM yang ditetapkan.

2. Integrasi

Integrasi merupakan suatu ukuran yang berpatokan pada tingkat kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat melaksanakan sosialisasi, mengembangkan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: proses sosialisasi.

BPBD Kota Sukabumi melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), tujuan melibatkan media ialah untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan sehingga bisa merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan sasaran, sehingga dapat mengurangi dan meminimalisir dampak negatif dari bencana. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan demi membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terutama di daerah yang rawan bencana, sehingga terbangunnya komunikasi yang sinergis antara BPBD dengan masyarakat, meningkatkan pemahaman bagi masyarakat dan membentuk tim siaga bencana di setiap kelurahan yang memiliki daya kapasitas pemahaman bencana.

Selain masyarakat sosialisasi diperuntukkan bagi mahasiswa, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti bersama salah satu mahasiswi Kota Sukabumi yang menyatakan “pelatihan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dalam rangka program MBKM Project Kemanusiaan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang bekerjasama dengan BPBD dan PMI Kota Sukabumi, acara ini berlangsung selama satu hari, yang diikuti oleh 20 orang mahasiswa PGSD. Pelatihannya diberikan teori setelah itu langsung praktek simulasi”.

Selain dengan mahasiswa KIE BPBD berkoordinasi dengan Rumah Sakit di Kota Sukabumi, sesuai hasil observasi pada 20 Januari 2022 KIE dan GULBENCAL melakukan praktik simulasi kecil penanggulangan bencana di RS Rido Galih, dengan tujuannya mengasah dan mengevaluasi kemampuan, peralatan, keselamatan dan pengamanan dari masing-masing pegawai yang dimiliki dalam menghadapi bencana.

Setiap melakukan pelatihan dan sosialisasi pihak BPBD selalu mengupdate kegiatan di media sosial baik itu di website, Instagram maupun media sosial lainnya. Hal ini baik karena masyarakat dan pengunjung situs web BPBD bisa dengan mudah melihat dan mempelajari kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai proses sosialisasi disimpulkan bahwa BPBD telah melakukan program sosialisasi dan simulasi penanganan bencana di

setiap kelurahan yang diwakili setiap RTRW dan LINMAS yang bekerja sama dengan pihak lain seperti TNI, POLRI dan relawan lain, guna mendapatkan informasi jelas dan bisa meningkatkan kapasitas masyarakat proses sosialisasi ini menggunakan media Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Tetapi dalam melaksanakan program ini belum merata di setiap kelurahan yang ada di Kota Sukabumi.

3. Adaptasi

Adaptasi memiliki definisi suatu tahapan atau proses yang dilakukan dengan menyesuaikan diri dalam menyerahkannya suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) sarana dan prasarana pendukung, (b) kualitas dan kuantitas tenaga kerja.

Sebagai unit kerja yang mengemban tugas dibidang penanggulangan bencana tentunya sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat, sarana dan prasarana pencarian, penyelamatan dan evakuasi dalam menunjang operasional dilapangan menjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD berpendapat tentang fasilitas yang ada sekarang, beliau mengatakan bahwa “terkait dengan fasilitas yang ada di kantor sekarang ini masih kurang, dikarenakan anggaran untuk menyediakan fasilitas penanganan bencana belum cukup. BPBD mendapatkan dana terkecil dibanding OPD lainnya sehingga hanya cukup untuk memberi upah pegawai disini. Maka dari itu sebagian sarana prasarana yang kurang dibantu oleh relawan dan pihak lain. Alhamdulillah nya kami selalu mendapatkan bantuan dari relawan-relawan yang bekerja sama dengan kami sehingga kekurangan itu bisa tertutupi”. Selanjutnya peneliti meminta pendapat kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD, beliau mengatakan bahwa “kami akan terus memfasilitasi kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh BPBD”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai sarana prasarana dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja kurangnya memadai untuk cakupan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi. Menutupi kekurangan yang ada pihak BPBD berkerja sama dengan para instansi lainnya, TNI, POLRI dan relawan.

Hasil Analisa beban kerja bahwa kebutuhan jumlah personil di lingkungan BPBD Kota Sukabumi idealnya sebanyak 125 orang. Hal ini diperkuat oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait kualitas dan kuantitas tenaga kerja “kapasitas pegawai kurang memadai, yang ahli dalam bencana hanya beberapa orang, mungkin bisa dikatakan dalam hal mitigasi bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana saya yang paling paham berdasarkan teori dan penerapannya. Karena saya pun paling senior yang ada di kantor ini. Pegawai disini terdiri dari tenaga harian lepas dan tenaga sukrela sehingga kurang memahami teori dan ilmu bencana. Oleh karena itu adanya pelatihan bagi semua pegawai disini yang diselenggarakan oleh kami sendiri ataupun pusat. Adanya pojok relawan yang terdiri dari beberapa organisasi relawan yang siap setia dan siaga membantu kami dalam penanganan bencana, sehingga kekurangan kami dibantu oleh mereka”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai BPBD bisa memadai karena adanya bantuan dari para relawan, pegawai tetap yang ada masihlah kurang dan pegawai ahli hanya ada beberapa orang, Sebagian besar pegawai mengandalkan kekuatan fisik dibanding dengan keahlian yang sudah seharusnya dimiliki setiap pegawai, maka dari itu BPBD selalu melakukan peningkatan kapasitas pegawainya dengan upaya upaya yang sudah dilakukan seperti simulasi dan pelatihan penanganan bencana.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian menemukan mengenai kebijakan tanggap darurat bencana di Kota Sukabumi telah melakukan koordinasi yang baik antar sektor terkait dan sosialisasi dalam program mitigasi non structural bencana telah berjalan baik di elemen masyarakat, tetapi program mitigasi struktural belum berjalan baik dikarenakan belum jelasnya kebijakan yang ada tentang Ruang Detail Tata Ruang yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga menghambat pelaksanaan program tersebut, layaknya penelitian Mimi Salminah dan Alviya yang mengatakan bahwa diperlukan koordinasi antar sector terkait, sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat karena keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh kejelasan isi kebijakan, baik yang bersifat konsep maupun praktis, serta proses koordinasi dan komunikasi antar pihak, baik yang berwenang maupun yang terkena dampak kebijakan (Mimi Salminah and Alviya, 2019).

BPBD terus melakukan upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana khususnya bencana tanah longsor dan agar masyarakat mampu melakukan tanggap serta evakuasi mandiri ketika terjadi bencana, hal ini perlu adanya pengetahuan atau ilmu yang menunjang di seluruh elemen masyarakat melalui pengajaran dan pelatihan yang dilakukan BPBD, belum terlaksananya secara menyeluruh di setiap unsur dan elemen masyarakat yang mendapatkan pelatihan skill tentang bencana walaupun sudah adanya program yang ditetapkan, layaknya penelitian Putri dan Khaerani yang menyatakan bahwa Mitigasi bencana lahan oleh BPBD belum maksimal, karena belum ada dokumen rencana kontijensi longsor sebagai acuan tindakan, pengetahuan dan sikap masyarakat yang apatis terhadap upaya mitigasi longsor (Putri and Khaerani, 2017).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah peneliti lakukan sebagaimana telah diuraikan dalam terhadap Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kota Sukabumi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum dapat dikategorikan efektif, hal ini dibuktikan dengan tiga indikator ukuran efektivitas hanya satu yang dikategorikan sudah efektif yaitu indikator integrasi, dimana BPBD mampu melakukan proses sosialisai mengenai bencana. Selanjutnya dalam indicator pencapaian tujuan belum maksimal dan indicator adaptasi dimana BPBD masih harus menyesuaikan sarana prasarana dan pegawai yang berkualitas
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Sukabumi ada dari internal dan eksternal, dari internalnya adalah terbatasnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan mitigasi serta kemampuan dan kapasitas pegawai yang masih kurang, sedangkan dari faktor eksternalnya adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, belum adanya regulasi yang jelas tentang Ruang Detail Tata Ruang dan pendanaan yang belum cukup kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor sangatlah rendah
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor hambatan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dalam bencana tanah longsor adalah lebih ditekankan kepada meningkatkan faktor internal dari BPBD seperti meningkatkan kemampuan pegawai dan mengadakan sarana prasarana yang memadai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pada saat penelitian ke daerah terjadinya bencana tanah longsor serta lokasi yang cukup sulit ditempuh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program mitigasi bencana tanah longsor di Kota Sukabumi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminudin. 2013. Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Bencana Alam. Bandung: Angkasa Bandung.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Gulo, W. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.

Kusumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta : Gava Media

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nazir, Mohammad. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Nurjanah, dkk. 2011. Manajemen Bencana. Jakarta: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Siagin, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Streers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

Wekke, Ismail Suardi. 2021. Mitigasi Bencana. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang Undang 1945 Alinea ke IV

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

C. Jurnal

Hamida, Fakhryza Nabila, and Hasti Widyasamratri. 2019. "Risiko Kawasan Longsor Dalam Upaya Mitigasi Bencana Menggunakan Sistem Informasi Geografis." *Pondasi* 24(1): 67.

Mimi Salminah, Mimi Salminah, and Alviya Alviya. 2019. "Effectiveness of Mangrove Management Policies To Support Climate Change Mitigation in East Kalimantan Province." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 16(1): 11–29.

Putri, Dumilah Pradapaning, and Thalita Rifda Khaerani. 2017. "Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Purworejo." *Journal Of Public Policy and Management Review* 6 (2): 1–14.

Ramadhan, Ilham, and Armansyah Matondang. 2018. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Dalam Penanggulangan Bencana Alam." *Ilmu Pemerintahan* 6(4): 1–120. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21237/5.BABI.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

D. Sumber Lain

Somantri, Andri. 2021. "Sepanjang 2021 Hingga Juli, 112 Bencana Terjadi Di Kota Sukabumi." [sukabumi.com.https://sukabumiupdate.com/posts/88259/sepanjang-2021-hingga-juli-112-bencana-terjadi-di-kota-sukabumi](https://sukabumiupdate.com/posts/88259/sepanjang-2021-hingga-juli-112-bencana-terjadi-di-kota-sukabumi). 4 Agustus 2021 pukul 22:00 WIB